



Efektivitas Program Pendampingan Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung

Muhammad Fachri Fermana Nurhidayat^{1*}, R Hari Bustomi Arifin²

¹⁻² Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

E-mail: mfachrif8j@gmail.com ^{1*}, hari.busthomi@unpas.ac.id ²

Alamat: Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 4026

*Pemulis Korespondensi

Abstract. *This study aims to determine the effectiveness of the Micro Business Actor Assistance program at the Bandung City KUMKM Office. Micro business actor assistance is a program of the Bandung city government through the Bandung City KUMKM Office where the micro business actor assistance program is a program to improve micro business actors so that they can be competitive and improve the quality of micro business actors. However, in its implementation, the Micro Business Actor Assistance at the Bandung City KUMKM Office has not been optimal and there are several obstacles such as the characteristics of the indifferent community and technical support still needs to be overcome to optimize the results of the program. Overall, Micro Business Actor Assistance is considered effective in achieving the goals of empowering micro business actors and improving quality and competitiveness at the Bandung City KUMKM Office. From the results of the study, it is known that 4 Themes, 9 Categories, and 108 Codes were found, the method used in this study is a qualitative method with a case study. In this study, data collection techniques were carried out by interviews, observation, documentation, and literature studies. The informants in this study include: Plta Kasie, head of the micro business sector, and assistants to micro business actors in the Kiaracondong, Batununggal and Lengkong sub-districts. The data analysis used in this study is the Miles & Huberman interactive model data analysis which consists of several components, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions or verification. Data analysis was carried out using the Atlas.ti software tool.*

Keywords: *Competitiveness; Effectiveness; KUMKM Office; Micro Business Actor Mentoring Program; Quality Improvement,*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program Pendampingan pelaku usaha mikro pada Dinas KUMKM Kota Bandung. Pendampingan pelaku usaha mikro merupakan program pemerintah kota bandung melalui dinas KUMKM Kota Bandung yang dimana program pendampingan pelaku usaha mikro yaitu sebuah program untuk meningkatkan para pelaku usaha mikro agar bisa berdaya saing dan meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro. Akan tetapi pada pelaksanaannya Pendampingan pelaku usaha mikro pada Dinas KUMKM Kota Bandung ini belum optimal dan terdapat beberapa kendala seperti karakteristik masyarakat yang acuh tak acuh dan dukungan teknis masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan hasil program. Secara keseluruhan, Pendampingan pelaku usaha mikro dianggap efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan peningkatan kualitas dan berdaya saing di Dinas KUMKM Kota Bandung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan 4 Tema, 9 Kategori, dan 108 Code, metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi: Plta Kasie kepala bidang usaha mikro, dan pendamping pelaku usah mikro pada wilayah kecamatan Kiaracondong, Batununggal dan Lengkong Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Atlas.ti.

Kata Kunci : Daya Saing; Dinas KUMKM; Efektivitas; Peningkatan Kualitas; Program Pendampingan pelaku usaha mikro,

1. PENDAHULUAN

Saat ini program pembinaan pelaku usaha mikro telah tersebar di setiap kecamatan di Kota Bandung, dengan total 601 unit usaha mikro yang masing-masing mendapat pendampingan satu orang pendamping per kecamatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan, penyusunan panduan pengembangan usaha, penyuluhan, serta pendampingan dalam manajemen, teknologi, konsultasi hukum, dan advokasi untuk memperluas peluang usaha. Program tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang UMKM, khususnya Pasal 13–14 yang menekankan pentingnya pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan agar UMKM memiliki daya saing. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek akses pemasaran. Hingga tahun 2020, hanya 7,27% pelaku usaha mikro yang memperoleh fasilitasi pemasaran dari total keseluruhan, menunjukkan bahwa program ini belum menjangkau mayoritas pelaku usaha dan banyak di antaranya masih kesulitan meningkatkan kualitas usahanya.

Untuk mencapai suatu efektivitas program Pendampingan Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu masih terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dalam efektivitas program program Pendampingan Usaha Mikro ini belum maksimal dilakukan dapat dilihat dari beberapa faktor yang belum berjalan yaitu diantaranya memengaruhi efektivitas program ini sehingga belum berjalan secara maksimal.

Pertama, Ketetapan Tujuan Program, program pendampingan usaha mikro di Kota Bandung belum optimal, khususnya dalam akses pemasaran. Hingga 2024, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang difasilitasi, sementara mayoritas masih kesulitan memasarkan produk. Rendahnya kesadaran pelaku usaha serta keterbatasan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan jaringan usaha turut menghambat perkembangan. Kedua, Sosialisasi Program, proses sosialisasi masih minim, terutama secara digital, sehingga banyak pelaku usaha mikro tidak terlibat. Keterbatasan SDM di Dinas KUMKM juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pendampingan. Ketiga, Tujuan Program, kendala utama terletak pada rendahnya daya saing produk dan akses permodalan. Hingga 2020, hanya 6,46% pelaku usaha yang berdaya saing tinggi, sementara keterbatasan modal dan rendahnya pemanfaatan ekosistem digital menghambat pengembangan usaha. Keempat, Monitor Program, pemantauan masih lemah, terbukti hanya 6,46% pelaku usaha memiliki produk berdaya saing dan 8,94%

SDM mendapat pelatihan. Rendahnya kualitas SDM serta kurangnya pendampingan berkelanjutan membuat usaha mikro sulit berkembang mandiri.mandiri

Program pendampingan usaha mikro di Kota Bandung telah berjalan sejak 2016 dan mencakup 30 kecamatan dengan target 900 usaha mikro, di mana satu pendamping membina 30 pelaku usaha. Hingga kini tercatat 9.707 pelaku usaha mikro di berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa, yang menunjukkan potensi besar UMKM sebagai pilar ekonomi lokal. Melalui pendampingan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan daya saing, sehingga tidak hanya memenuhi pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dengan strategi pengembangan yang tepat, UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi Kota Bandung yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik meneliti efektivitas program pendampingan usaha mikro di Kota Bandung dengan fokus pada ketetapan tujuan program, sosialisasi, serta pelaksanaan monitoring. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas program pendampingan usaha mikro di Kota Bandung? (2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya? dan (3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut

2. METODEEE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan studi kasus untuk melihat Efektivitas Program Pendampingan Pelaku Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan fenomena. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Efektivitas program pendampingan usaha mikro di kota bandung. Penelitian ini akan mengeksplorasi upaya yang telah dilakukan terkait analisis program pendampingan usaha mikro serta faktor yang mendukung juga menghambat. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, data akan dijelaskan secara rinci dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan alternatif solusi yang sesuai untuk masalah yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai Efektivitas Program Pendampingan Pelaku Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.yang di ukur berdasarkan teori indikator keberhasilan suatu efektivitas yaitu menurut Subagyo yang dikutip oleh Budiani dalam Rachman dkk (2024:105)

- Ketetapan tujuan program
- Sosialisasi program
- Tujuan program
- Monitor program

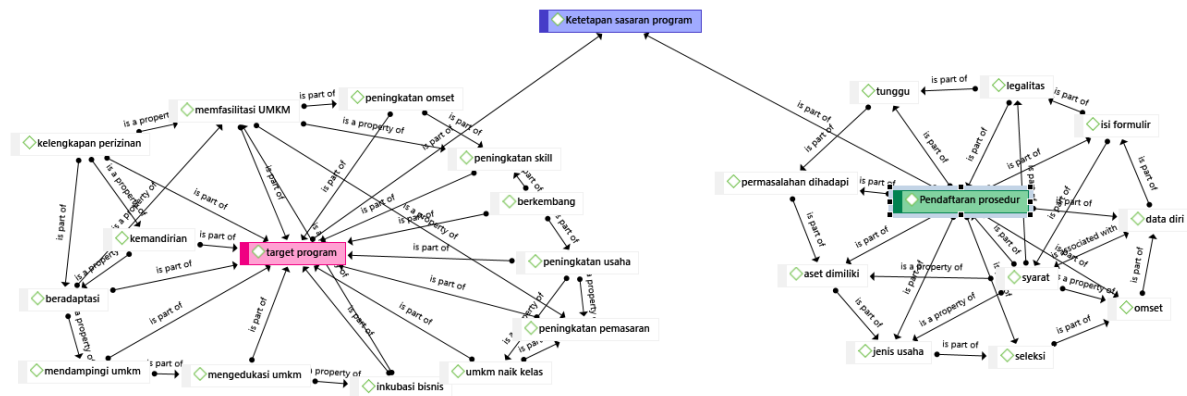
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Menurut Silalahi dalam Satibi (2017:134), pengumpulan data secara konseptual adalah proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan metode tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literature review dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui memo dan transkrip hasil penelitian, sedangkan penyajian data berbentuk naratif singkat melalui proses koding dan kategorisasi data untuk memudahkan identifikasi serta menjawab rumusan masalah. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti diharapkan menemukan temuan baru berupa deskripsi, hubungan kausal, hipotesis, atau teori yang memperjelas fenomena penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan alat bantu dengan software Atlas ti

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai efektivitas program pendampingan pelaku usaha mikro diukur melalui empat kriteria, yaitu ketepatan tujuan program, sosialisasi program, tujuan program, dan monitoring program. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Atlas.ti melalui tahapan coding data, penentuan kategori, hingga identifikasi tema utama. Dari proses ini, diperoleh 108 coding yang kemudian dikelompokkan menjadi 9 kategori data dan dirumuskan ke dalam 4 tema utama. Sembilan kategori yang terbentuk meliputi: prosedur pendaftaran, target program, penyuluhan dinas, komunikasi dinas, tantangan program, upaya menghadapi tantangan, manfaat program, kerja sama antar-stakeholders, dan pemantauan program. Selanjutnya, empat tema utama yang diidentifikasi adalah: ketetapan sasaran program, digitalisasi program, analisis program, serta hubungan antar-stakeholders. Hasil pengkodean dan kategorisasi tersebut divisualisasikan melalui output Atlas.ti sehingga memudahkan peneliti memahami struktur data serta keterkaitan antar elemen penelitian.

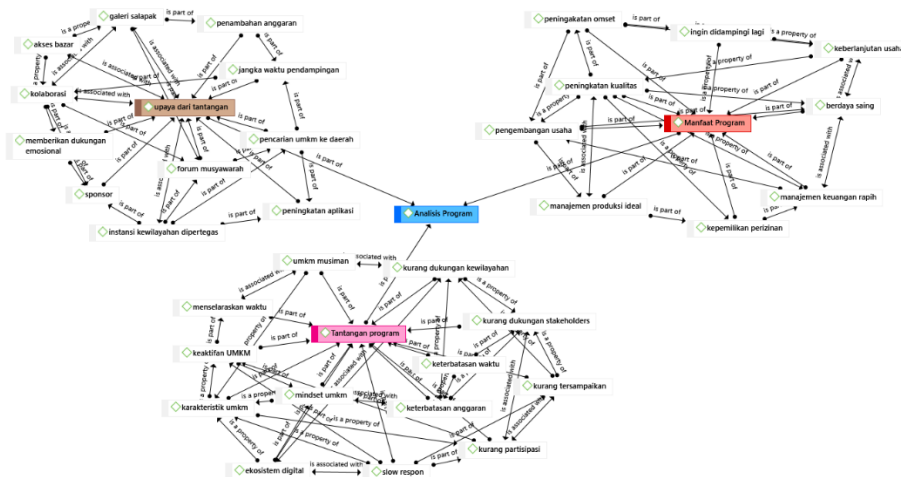
Tema Ketetapan Sasaran Program



Peneliti menemukan bahwa program pendampingan pelaku usaha mikro memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar pelaku usaha yang masih minim keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha, mulai dari pemasaran, manajemen keuangan, legalitas, hingga pengembangan produk. Melalui pelatihan seperti digital marketing, pengelolaan keuangan, dan fasilitasi legalitas usaha, program ini mendorong pelaku usaha agar tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu bertahan di tengah persaingan pasar. Tujuan lain program ini adalah mencetak pelaku usaha yang mandiri, berdaya juang, serta siap naik kelas dari sisi kualitas produk maupun pengelolaan. Selain itu, program juga membangun fondasi keberlanjutan usaha mikro melalui pendekatan terstruktur sesuai kebutuhan, sehingga pelaku usaha dapat tumbuh secara konsisten setelah program berakhir. Dengan demikian, pendampingan ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing global.

Prosedur pendaftaran program dinilai baik karena fleksibel dan mudah diakses, baik secara luring maupun daring, sehingga menjangkau lebih banyak peserta. Pendaftaran mencakup data penting seperti jenis usaha, kebutuhan pelatihan, omzet, aset, dan legalitas untuk memastikan pendampingan tepat sasaran. Formulir yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta juga berfungsi strategis agar program lebih bermanfaat dan efektif.

Tema Analisis Program

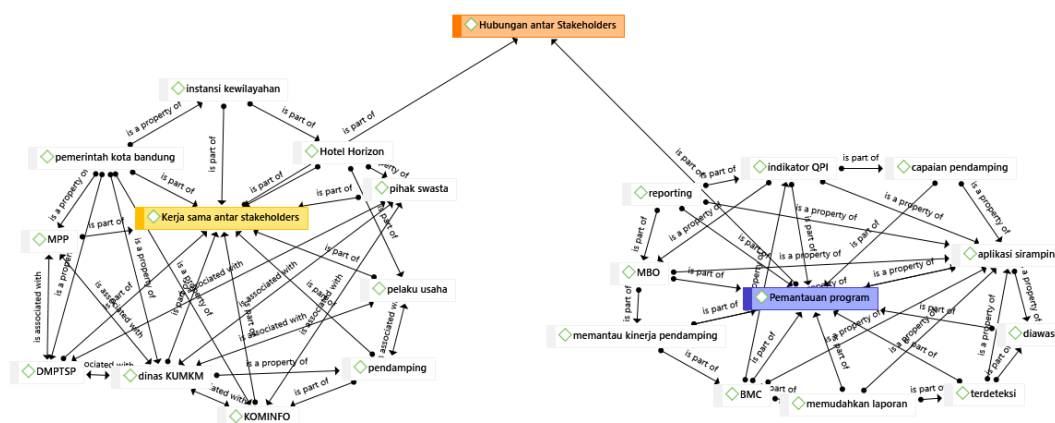


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program pendampingan pelaku usaha mikro di Kota Bandung masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan pelaku usaha dalam pengetahuan digital, manajemen, dan kesiapan beradaptasi, ditambah mayoritas peserta berusia di atas 40 tahun sehingga pendampingan digital marketing dan pembukuan kurang optimal. Dukungan kelembagaan kewilayahan juga belum merata, serta hambatan teknis seperti pengurusan legalitas (NIB) sering terkendala koordinasi antarinstansi. Pendamping menghadapi kesulitan menjangkau pelaku usaha musiman atau yang sulit dihubungi, dengan target minimal 30 peserta per bulan, bahkan harus turun langsung hingga tingkat RT/RW dan menanggung biaya sendiri. Keberlanjutan program pun terhambat karena banyak pelaku usaha kesulitan menjaga kerja sama dengan mitra akibat masalah arus modal.

Meski demikian, program ini tetap memberi dampak positif. Dukungan pemasaran melalui Galeri Salapak dan bazar kecamatan membuka akses pasar baru, sementara pendekatan personal seperti kunjungan langsung membangun kepercayaan diri peserta. Media digital (WhatsApp) juga dimanfaatkan untuk mempercepat informasi dan pendataan, meski masa pendampingan delapan bulan dinilai terlalu singkat dan perlu diperpanjang hingga dua tahun agar efektif. Program ini terbukti bermanfaat dalam legalitas, pemasaran, serta peningkatan manajerial: banyak pelaku usaha berhasil memperoleh dokumen legal, mengikuti bazar dengan omzet belasan juta rupiah, dan mendapat pelatihan dasar digital marketing serta manajemen usaha.

Secara keseluruhan, program pendampingan telah berkembang dari 7 kecamatan menjadi hampir seluruh 30 kecamatan, dan berperan penting dalam meningkatkan daya saing, kemandirian, serta keberlanjutan usaha mikro, baik dari aspek teknis maupun strategis.

Tema Hubungan antar Stakeholders



Program Pendampingan Pelaku Usaha Mikro tidak hanya bergantung pada peran Dinas KUMKM, tetapi juga pada kualitas hubungan antar lembaga (stakeholders). Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam aspek legalitas, pemasaran, dan sosialisasi. Kerja sama dengan pihak swasta, seperti Farmhouse Lembang, Rabani, Grab, dan Galeri Salapak di Hotel Horison, berhasil memperluas akses pasar dan meningkatkan eksposur usaha mikro. Sementara itu, dukungan lembaga kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam sosialisasi dan perekrutan peserta, meski masih terdapat wilayah yang pasif sehingga diperlukan SOP atau kesepakatan formal untuk memperjelas peran mereka. Hambatan juga muncul dalam koordinasi lintas dinas, terutama terkait pengurusan legalitas NIB, padahal legalitas menjadi fondasi pengembangan usaha. Karena itu, penguatan sinergi antar pemerintah, swasta, dan wilayah diperlukan agar program lebih efektif.

Disisi lain, program telah menerapkan sistem pemantauan berbasis digital melalui aplikasi Siramping yang berfungsi sebagai media pelaporan rutin, lengkap dengan indikator kinerja (QPI) untuk menilai capaian pendamping. Sistem ini memungkinkan evaluasi ketat, termasuk pemberian peringatan hingga penggantian pendamping yang tidak memenuhi target, sekaligus memastikan standar mutu dan akuntabilitas. Selain aspek administratif, pemantauan juga menitikberatkan pada hasil nyata, seperti percepatan penyelesaian legalitas usaha. Kehadiran Siramping membawa transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelaporan, meski tetap diperlukan peningkatan kapasitas serta komitmen pendamping agar program berjalan optimal dan berkelanjutan.

Hambatan dan Usaha dalam Efektivitas Program Pendampingan pelaku usaha mikro di Dinas KUMKM Kota Bandung

Hambatan

Sejak 2020, pelaksanaan program pendampingan pelaku usaha mikro menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Hambatan utama berasal dari karakteristik pelaku usaha, seperti resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital, serta sikap pasif terhadap inovasi, khususnya pada peserta berusia di atas 40 tahun yang masih kesulitan menggunakan media sosial dan belum memisahkan keuangan pribadi dengan usaha. Masalah komunikasi juga kerap muncul, baik karena sulit dihubungi, respons lambat, maupun ketidaksinkronan jadwal dengan pendamping. Persebaran informasi program belum merata akibat keterbatasan akses digital, sementara dukungan dari kecamatan dan kelurahan tidak konsisten, membuat sebagian pendamping harus menanggung biaya sendiri. Hambatan birokrasi, terutama terkait legalitas NIB, semakin memperlambat proses karena minim koordinasi antarinstansi. Selain itu, durasi pendampingan delapan bulan dianggap terlalu singkat untuk mendorong perubahan signifikan, apalagi pendamping harus turun langsung hingga tingkat RT/RW untuk merekrut peserta di wilayah dengan respons rendah. Keberagaman jenis usaha, termasuk usaha musiman, juga menyulitkan keberlanjutan program karena tidak semua pelaku usaha memiliki komitmen yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan strategi komunikasi, perpanjangan masa pendampingan, serta penguatan dukungan kelembagaan agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan..

Usaha

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam program pendampingan usaha mikro, para pendamping menunjukkan fleksibilitas dan inisiatif di luar skema formal dengan tetap menjaga komunikasi serta memberi arahan meski masa pendampingan delapan bulan telah berakhir. Rendahnya partisipasi dan sulitnya menjangkau pelaku usaha diatasi melalui pendekatan langsung hingga tingkat RT/RW, memanfaatkan momentum Ramadan, serta menjalin komunikasi dengan perangkat wilayah meski dukungan kecamatan dan kelurahan masih minim. Keterbatasan fasilitas dan anggaran disiasati melalui kemitraan dengan pihak ketiga seperti Bank BJB, universitas, komunitas, dan lembaga swasta untuk penyediaan narasumber, konsumsi, fotografer produk, hingga bantuan teknis lainnya tanpa membebani anggaran daerah. Dalam menghadapi karakter pelaku usaha yang pasif dan minim literasi digital, pendamping menggunakan pendekatan emosional dengan membangun hubungan interpersonal, menyesuaikan metode edukasi berdasarkan usia dan latar belakang, serta memberikan materi secara perlahan agar lebih mudah diterima. Hasil evaluasi menunjukkan

bahwa durasi delapan bulan belum cukup untuk menciptakan perubahan signifikan, sehingga Dinas merancang kebijakan perpanjangan masa pendampingan menjadi dua tahun. Dengan durasi lebih panjang, program diharapkan dapat menyentuh aspek strategis usaha serta melahirkan UMKM yang adaptif, mandiri, dan kompetitif..

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan terkait dengan Efektivitas Program Pendampingan Pelaku usaha mikro pada Dinas KUMKM Kota Bandung yang menggunakan alat bantu Software Atlas.ti ini memiliki temuan pengelompokkan data menjadi 108 coding, yang kemudian disusun ke dalam 9 kategorisasi data dan dirumuskan ke dalam 4 tema utama. Adapun empat (4) tema utama yang berhasil diidentifikasi adalah: Ketetapan Sasaran Program, Digitalisasi Program, Analisis Program, Hubungan antar stakeholders.

Tema Ketetapan sasaran program, dimana ketetapan sasaran program pendampingan pelaku usaha mikro yang diterapkan Dinas KUMKM Kota Bandung dirancang secara fleksibel dan inklusif, sehingga mempermudah akses sekaligus menjangkau lebih banyak peserta. Melalui formulir yang disesuaikan dengan kebutuhan, data peserta dapat dihimpun secara komprehensif untuk memastikan pendampingan berjalan tepat sasaran, efisien, dan efektif. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha mikro melalui berbagai pelatihan dan fasilitasi yang relevan, mulai dari pemasaran digital, manajemen keuangan, hingga legalitas usaha. Selain mengasah keterampilan teknis, program juga menekankan pembentukan mentalitas pelaku usaha agar lebih tangguh, mandiri, dan siap bersaing. Dengan pendekatan yang terstruktur serta berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang, program pendampingan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya ekosistem UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tema Digitalisasi program, dimana program pendampingan pelaku usaha mikro masih menghadapi tantangan dalam efektivitas penyuluhan, terutama di wilayah yang kurang responsif atau minim koordinasi dengan pihak dinas. Meskipun telah menggunakan berbagai metode pendekatan, penyebaran informasi belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh serta penyesuaian strategi penyuluhan agar informasi program dapat diterima secara merata, akurat, dan tepat waktu oleh seluruh pelaku usaha mikro di berbagai wilayah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang adaptif, fleksibel, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik peserta. Dalam hal ini, pendamping tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai

fasilitator dan motivator yang menjalin komunikasi personal maupun kelompok secara efektif. Dengan mengombinasikan metode formal dan informal serta memanfaatkan teknologi digital, program mampu menjangkau pelaku usaha lebih luas. Pendekatan yang menekankan aspek sosial, psikologis, dan teknis menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan lapangan..

Tema Analisis Program, dimana program pendampingan pelaku usaha mikro di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya, seperti keterbatasan pengetahuan dan kesiapan mental pelaku usaha, rendahnya literasi digital, ketimpangan dukungan kelembagaan wilayah, kendala teknis perizinan, kesulitan menjangkau peserta, serta keterbatasan logistik yang sering dibebankan kepada pendamping. Hambatan keberlanjutan pasca-program juga terlihat, terutama dalam menjaga kemitraan dan kualitas produksi. Meski demikian, program ini terbukti memberi dampak positif, khususnya melalui strategi pemasaran, pendekatan personal, serta penyediaan pelatihan dan fasilitasi. Keberadaan Galeri Salapak di Hotel Horison dan akses ke bazar menjadi langkah konkret dalam memperluas pasar pelaku usaha. Program ini juga membantu pengurusan legalitas, penguatan manajerial, serta peningkatan keterampilan dasar seperti digital marketing dan manajemen keuangan. Dengan jangkauan yang kini hampir mencakup seluruh kecamatan, program pendampingan terbukti relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan usaha mikro. Agar lebih optimal, diperlukan perpanjangan masa pendampingan, pemerataan akses informasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan dukungan teknis dan logistik sehingga program dapat berjalan lebih berkelanjutan dan strategis..

Tema Hubungan antar stakeholders, dimana keberhasilan Program Pendampingan Pelaku Usaha Mikro sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, bukan hanya peran Dinas KUMKM semata. Sinergi dengan sektor swasta membantu memperluas akses pasar, sementara dukungan lembaga kewilayahan mempermudah sosialisasi dan rekrutmen peserta. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan keterlibatan wilayah dan lemahnya koordinasi antar dinas, khususnya dalam pengurusan legalitas usaha. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan koordinasi yang lebih sistematis agar program berjalan efektif, inklusif, dan berdampak nyata. Dari sisi pemantauan, program ini telah menerapkan aplikasi Siramping sebagai sarana pelaporan pendamping sekaligus alat evaluasi berbasis indikator kinerja (KPI) yang memungkinkan pemantauan objektif dan real-time. Sistem ini dilengkapi peringatan otomatis serta evaluasi bertahap yang mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan mutu pendampingan. Namun, agar lebih optimal, masih

diperlukan peningkatan akurasi laporan, kedisiplinan pendamping, serta penguatan kapasitas dan komitmen secara berkelanjutan.

Saran

Program pendampingan pelaku usaha mikro perlu dijalankan secara berkelanjutan karena memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain memberikan dukungan teknis dan manajerial, program ini juga mendorong pelaku usaha agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah, sekaligus membangun ekosistem UMKM yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Untuk memperluas jangkauan, Dinas KUMKM Kota Bandung disarankan tidak hanya mengandalkan media sosial, tetapi juga menggandeng kanal resmi Pemerintah Kota seperti Info Bandung Kota, serta memanfaatkan media tradisional, spanduk, pamflet, penyuluhan langsung, hingga pendekatan door to door bersama Karang Taruna, PKK, dan pengurus RT/RW. Prosedur pendaftaran yang saat ini hanya mensyaratkan KTP sudah memadai, namun akan lebih valid jika dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) sebagai verifikasi ganda. Selain itu, Dinas perlu menyusun SOP atau perjanjian kinerja yang mewajibkan kecamatan dan kelurahan aktif dalam sosialisasi serta pengumpulan data agar partisipasi merata di seluruh wilayah. Dari sisi teknis, aplikasi SIRAMPING masih memiliki kendala, terutama pada fitur pengeditan dan penghapusan data, sehingga perlu diperbarui agar lebih fleksibel dan user-friendly. Pasca-program, pelaku usaha juga sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, melainkan dipantau secara rutin, misalnya setiap tiga bulan, guna mengevaluasi perkembangan, mengidentifikasi kendala, serta memberikan intervensi lanjutan yang tepat agar tujuan peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, C., Cikusin, & Widodo. (2020). Efektivitas kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Respon Publik*, 14(5), 81–84.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu administrasi negara: Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance*. CV Pustaka Setia.
- Anggoro, B. (2025, Januari 29). Pemkot Bandung dinilai tak serius bina UMKM. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/736546/pemkot-bandung-dinilai-tak-serius-bina-umkm>
- Ariesmansyah, B., Bustomi, & Ardhia. (2023). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58–72. <https://doi.org/10.24014/jel.v14i1.25060>
- Brilyana, Y. A. (2025, Maret 6). Lejitkan omzet UMKM lewat “Sirkuit”. *Bandung.go.id*.

- Brilyana, Y. A. (2025, Maret 6). Sebanyak 13 pengusaha Kota Bandung raih UMKM Award. Bandung.go.id.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1), 49–57.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung. (2022). Dokumen LAKIP 2022.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung. (2023). Dokumen LAKIP 2023.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung. (2024). Dokumen LAKIP 2024.
- Fachrurazi, dkk. (2021). Teori dan konsep manajemen sumber daya manusia. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Febriani, N., Abdullah, A., & Ramayana. (2023). Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna. *Public Administration and Government Journal*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v3i1.31249>
- Gantika, G., Busthomi, & Vaughan. (2022). Organizational effectiveness in application dynamic information and archiving systems (SIKD) library and archives in Bandung City. *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.23969/jess.v5i1.4929>
- Ikhsan. (2017). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 6818–6843.
- Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. PT Refika Aditama.
- Mutiarin, D., & Zainudin. (2021). Manajemen birokrasi dan kebijakan. Pustaka Belajar.
- Newswire. (2023, Juni 20). 2.000 UMKM di Kota Bandung naik kelas usai pendampingan. Bandung Bisnis. <https://bandung.bisnis.com/read/20230620/550/1667430/2000-umkm-di-kota-bandung-naik-kelas-usai-pendampingan>
- Nurfauziah, & Nurcahyanto. (2020). Analisis efektivitas program tenaga kerja mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 15–34.
- Pemerintah Kota Bandung. (2009). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah.

- Rachman, dkk. (2021). Optimalisasi sistem pengelolaan sampah perkotaan. CV Tohar Media.
- Sarkati, Raudah, & Fahmi. (2024). Efektivitas program pengembangan usaha kecil menengah (UKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil/Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(4).
- Satibi, I. (2017). Metode penelitian administrasi publik. Lemlit Unpas Press.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas organisasi (M. Jamin, Trans.). Erlangga.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susanti, R. (2023, Oktober 16). Baru 50 persen usaha mikro di Bandung yang kantong izin. Kompas.com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/10/16/211515678/baru-50-persen-usaha-mikro-di-bandung-yang-kantongi-izin>